



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 52 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953

- Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14);

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan
13. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia

- pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informasi pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
 15. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 17. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini membentuk
 - 1) UPTD Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu:
 - a. UPTD TK;
 - b. UPTD SD; dan
 - c. UPTD SMP.
 - 2) Koordintor Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, yaitu:
 - a. koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan kecamatan pelaihari;
 - b. koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan kecamatan kintap;
 - c. koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan kecamatan jorong;
 - d. koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan kecamatan batu ampar;
 - e. koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan kecamatan panyipatan;
 - f. koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan kecamatan takisung;
 - g. koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan kecamatan tambang ulang;
 - h. koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan kecamatan bati-bati;
 - i. koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan kecamatan bumi makmur;
 - j. koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan kecamatan kurau; dan
 - k. koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan kecamatan bajuin.

- (2) Daftar UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Koordinator wilayah Kecamatan merupakan unit kerja nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
UPTD Satuan Pendidikan

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan terdiri atas:
 - a. UPTD Satuan Pendidikan;
 - b. urusan tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Pasal 5

- (1) UPTD Satuan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan belajar mengajar, pembinaan personil, sarana prasarana dan kurikulum pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Satuan Pendidikan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan operasional pengelolaan UPTD;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi

permasalahan-permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas pengelolaan UPTD;

- c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan UPTD;
 - d. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
 - e. pelaksanaan urusan perencanaan, pengembangan, penjaminan mutu, supervisi, pembelajaran, pembimbingan, dan konseling;
 - f. penyelenggaraan proses pembelajaran sesuai ketentuan berlaku;
 - g. penyelenggaraan evaluasi hasil belajar Peserta Didik;
 - h. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua Peserta Didik, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
 - i. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, pendataan, keuangan, sarana dan prasarana, layanan kesiswaan, layanan kepastakaan, layanan keamanan, dan kebersihan;
 - j. penyediaan sarana dan fasilitas belajar; dan
 - k. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan operasional pengelolaan UPTD SD;
 - b. menetapkan perencanaan kinerja UPTD berdasarkan Rencana Strategis/Rencana Kerja Dinas;
 - c. melaksanakan kebijakan umum dan teknis serta mengoordinasikan kegiatan UPTD sesuai dengan kebijakan Dinas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan UPTD;
 - e. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan UPTD;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan unit lain/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD;
 - g. menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. mengoordinasikan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dibidang pelayanan pendidikan;
 - i. melaksanakan fasilitasi pelatihan teknis pendidik;
 - j. menyelenggarakan kebijakan teknis kegiatan belajar mengajar, pembinaan tenaga edukatif dan non edukatif, pengelolaan sarana prasarana dan kurikulum dalam wilayah kerjanya;
 - k. membimbing, membina dan mengawasi kegiatan belajar mengajar dan pengelolaan sarana prasarana sekolah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan di bidang pendidikan;
 - l. menyelenggarakan unit produksi sekolah dalam rangka meningkatkan kompetensi siswa;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan stakeholder dalam rangka peningkatan mutu pendidikan;
 - n. melaksanakan sosialisasi program kegiatan sekolah;

- o. melaksanakan evaluasi hasil belajar Peserta Didik;
- p. melaksanakan fasilitasi bimbingan konseling Peserta Didik;
- q. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan prestasi akademik dan non akademik Peserta Didik;
- r. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan prestasi pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- s. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan prestasi kelembagaan sekolah;
- t. mengelola administrasi kepegawaian pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- u. melaksanakan koordinasi dengan pengawas sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan;
- v. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembiayaan terhadap siswa yang tidak mampu dengan instansi terkait;
- w. merumuskan program, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkaji uji coba penerapan model program peningkatan kualitas;
- x. melaksanakan dan mengevaluasi pengembangan media dan bahan pembelajaran pendidikan;
- y. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan menumbuhkan kembangkan minat baca siswa;
- z. mengatur pendayagunaan pendidik dan Tenaga Kependidikan pada wilayah UPTD;
- aa. melaksanakan inventarisasi barang/Aset daerah pada wilayah UPTD;
- bb. melaksanakan inventarisasi kebutuhan, usulan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana pendidikan pada wilayah UPTD;
- cc. melaksanakan pembinaan pengelolaan urusan ketatausahaan;
- dd. mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas UPTD; dan
- ee. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Paragraf 3 Urusan Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi kurikulum, Peserta Didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. melaksanakan administrasi kurikulum;
 - b. melaksanakan administrasi Peserta Didik;
 - c. melaksanakan administrasi sarana dan prasarana;
 - d. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja anggaran dan melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan;

- g. menyiapkan bahan dan penyusunan program kegiatan;
- h. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data pelaksanaan kegiatan UPTD;
- i. melaksanakan penatausahaan barang dan inventarisir barang;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- k. menyusun laporan kinerja dan laporan sejenis sesuai tugas dan fungsinya;
- l. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan perlengkapan;
- m. mengelola keamanan dan kebersihan kantor; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan

Pasal 8

- (1) Koordinator wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada Satuan Pendidikan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Wilayah Kecamatan bidang pendidikan mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan data Peserta Didik, sarana, prasarana, pendidik, dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan di wilayah kerjanya;
 - a. pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan angka kredit pendidik dan Tenaga Kependidikan;

- b. pelaksanaan koordinasi lomba-lomba di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah; dan
- d. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (7) Dalam upaya meningkatkan efektifitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, bimbingan dan evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Satuan Pendidikan merupakan Jabatan Fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Urusan tata usaha bukan merupakan jabatan struktural.
- (3) Koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan bukan merupakan jabatan struktural.
- (4) Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan Pejabat Fungsional dan nonstruktural dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibebankan pada APBD dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 81 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

alfun

ALFIRIAL SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 21 Oktober 2024
PJ. BUPATI TANAH LAUT,

ttd

SYAMSIR RAHMAN

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 21 Oktober 2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

ttd

SUPARMI
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 52

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 52 TAHUN 2024
TANGGAL : 21 OKTOBER 2024

**DAFTAR UPTD TAMAN KANAK-KANAK
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	NPSN	NAMA UNIT	KECAMATAN
1	30311792	UPTD TK NEGERI PEMBINA BAJUIN	BAJUIN
2	30311910	UPTD TK NEGERI PEMBINA BATU AMPAR	BATU AMPAR
3	69955295	UPTD TK NEGERI PEMBINA KINTAP	KINTAP
4	69979349	UPTD TK NEGERI PEMBINA KURAU	KURAU
5	30311879	UPTD TK NEGERI PEMBINA PANYIPATAN	PANYIPATAN
6	30311741	UPTD TK NEGERI PEMBINA PELAIHARI	PELAIHARI
7	30311796	UPTD TK NEGERI PEMBINA TAKISUNG	TAKISUNG
8	69917750	UPTD TK NEGERI PEMBINA TAMBANG ULANG	TAMBANG ULANG
9	30311815	UPTD TK NEGERI PEMBINA BATI-BATI	BATI-BATI
10	30311853	UPTD TK NEGERI PEMBINA JORONG	JORONG
11	-	UPTD TK NEGERI PEMBINA BUMI MAKMUR	BUMI MAKMUR
12	30311746	UPTD TK NEGERI PABAHANAN	PELAIHARI
13	30311863	UPTD TK NEGERI KARANG REJO	JORONG

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SUKSESARAT DAERAH

PJ. BUPATI TANAH LAUT,

ttd

AT FIRIAL, SH. MH
015750203 155903 2 008

SYAMSIR RAHMAN

**DAFTAR UPTD SEKOLAH DASAR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	NPSN	NAMA UNIT	KECAMATAN
1	30300721	UPTD SD NEGERI AMBUNGAN	PELAIHARI
2	30300720	UPTD SD NEGERI 1 ANGSAU	PELAIHARI
3	30300719	UPTD SD NEGERI 2 ANGSAU	PELAIHARI
4	30300718	UPTD SD NEGERI 3 ANGSAU	PELAIHARI
5	30300717	UPTD SD NEGERI 4 ANGSAU	PELAIHARI
6	30300716	UPTD SD NEGERI 5 ANGSAU	PELAIHARI
7	30300715	UPTD SD NEGERI 6 ANGSAU	PELAIHARI
8	30300746	UPTD SD NEGERI ATU - ATU	PELAIHARI
9	30300868	UPTD SD NEGERI 1 BUMI JAYA	PELAIHARI
10	30300869	UPTD SD NEGERI 2 BUMI JAYA	PELAIHARI
11	30300858	UPTD SD NEGERI GUNTUNG BESAR	PELAIHARI
12	30300815	UPTD SD NEGERI KAMPUNG BARU	PELAIHARI
13	30300830	UPTD SD NEGERI 1 KARANG TARUNA	PELAIHARI
14	30300829	UPTD SD NEGERI 2 KARANG TARUNA	PELAIHARI
15	30300828	UPTD SD NEGERI 3 KARANG TARUNA	PELAIHARI
16	30300598	UPTD SD NEGERI PABAHANAN	PELAIHARI
17	30300628	UPTD SD NEGERI 1 PANGGUNG	PELAIHARI
18	30300627	UPTD SD NEGERI 2 PANGGUNG	PELAIHARI
19	30300626	UPTD SD NEGERI PANGGUNG BARU	PELAIHARI
20	30300625	UPTD SD NEGERI PANJARATAN	PELAIHARI
21	30300617	UPTD SD NEGERI 1 PELAIHARI	PELAIHARI
22	30300616	UPTD SD NEGERI 2 PELAIHARI	PELAIHARI
23	30300615	UPTD SD NEGERI 3 PELAIHARI	PELAIHARI
24	30300614	UPTD SD NEGERI 4 PELAIHARI	PELAIHARI
25	30300613	UPTD SD NEGERI 5 PELAIHARI	PELAIHARI
26	30300592	UPTD SD NEGERI 6 PELAIHARI	PELAIHARI
27	30300591	UPTD SD NEGERI 7 PELAIHARI	PELAIHARI

NO	NPSN	NAMA UNIT	KECAMATAN
28	30300561	UPTD SD NEGERI 8 PELAIHARI	PELAIHARI
29	30300562	UPTD SD NEGERI 9 PELAIHARI	PELAIHARI
30	69786585	UPTD SD NEGERI PEMUDA	PELAIHARI
31	30300570	UPTD SD NEGERI SARANG HALANG	PELAIHARI
32	30300586	UPTD SD NEGERI SUMBER MULIA	PELAIHARI
33	30300577	UPTD SD NEGERI 1 SUNGAI RIAM	PELAIHARI
34	30300576	UPTD SD NEGERI 2 SUNGAI RIAM	PELAIHARI
35	30300575	UPTD SD NEGERI 3 SUNGAI RIAM	PELAIHARI
36	30300682	UPTD SD NEGERI TAMPANG	PELAIHARI
37	30300692	UPTD SD NEGERI 1 TELAGA	PELAIHARI
38	30300693	UPTD SD NEGERI 2 TELAGA	PELAIHARI
39	30300709	UPTD SD NEGERI TUNGKARAN	PELAIHARI
40	30300705	UPTD SD NEGERI 1 UJUNG BATU	PELAIHARI
41	30300704	UPTD SD NEGERI 2 UJUNG BATU	PELAIHARI
42	30300745	UPTD SD NEGERI 1 BAJUIN	BAJUIN
43	30300744	UPTD SD NEGERI 2 BAJUIN	BAJUIN
44	30300857	UPTD SD NEGERI GALAM	BAJUIN
45	30300823	UPTD SD NEGERI KETAPANG	BAJUIN
46	30300817	UPTD SD NEGERI 1 KUNYIT	BAJUIN
47	30300816	UPTD SD NEGERI 2 KUNYIT	BAJUIN
48	30300594	UPTD SD NEGERI 1 PEMALONGAN	BAJUIN
49	30300563	UPTD SD NEGERI 2 PEMALONGAN	BAJUIN
50	30300552	UPTD SD NEGERI RIAM PINANG	BAJUIN
51	30300585	UPTD SD NEGERI SUNGAI BAKAR	BAJUIN
52	30300681	UPTD SD NEGERI 1 TANJUNG	BAJUIN
53	30300680	UPTD SD NEGERI 2 TANJUNG	BAJUIN
54	30300679	UPTD SD NEGERI 3 TANJUNG	BAJUIN
55	30300676	UPTD SD NEGERI 1 TEBING SIRING	BAJUIN
56	30300675	UPTD SD NEGERI 2 TEBING SIRING	BAJUIN
57	30300674	UPTD SD NEGERI 3 TEBING SIRING	BAJUIN
58	30305450	UPTD SD NEGERI 4 TEBING SIRING	BAJUIN
59	30300711	UPTD SD NEGERI 1 TIRTA JAYA	BAJUIN

NO	NPSN	NAMA UNIT	KECAMATAN
60	30300710	UPTD SD NEGERI 2 TIRTA JAYA	BAJUIN
61	30300734	UPTD SD NEGERI BATILAI	TAKISUNG
62	30300845	UPTD SD NEGERI 1 BENUA LAWAS	TAKISUNG
63	30300844	UPTD SD NEGERI 2 BENUA LAWAS	TAKISUNG
64	30300560	UPTD SD NEGERI 3 BENUA LAWAS	TAKISUNG
65	30300841	UPTD SD NEGERI 1 BENUA TENGAH	TAKISUNG
66	30300840	UPTD SD NEGERI 2 BENUA TENGAH	TAKISUNG
67	30300839	UPTD SD NEGERI 3 BENUA TENGAH	TAKISUNG
68	30300859	UPTD SD NEGERI 1 GUNUNG MAKMUR	TAKISUNG
69	30300860	UPTD SD NEGERI 2 GUNUNG MAKMUR	TAKISUNG
70	30300861	UPTD SD NEGERI 3 GUNUNG MAKMUR	TAKISUNG
71	30300863	UPTD SD NEGERI 4 GUNUNG MAKMUR	TAKISUNG
72	30300862	UPTD SD NEGERI 5 GUNUNG MAKMUR	TAKISUNG
73	30300818	UPTD SD NEGERI 1 KUALA TAMBANGAN	TAKISUNG
74	69968291	UPTD SD NEGERI 2 KUALA TAMBANGAN	TAKISUNG
75	30300618	UPTD SD NEGERI PAGATAN BESAR	TAKISUNG
76	30300568	UPTD SD NEGERI 1 RANGGANG	TAKISUNG
77	30300569	UPTD SD NEGERI 2 RANGGANG	TAKISUNG
78	30300559	UPTD SD NEGERI RANGGANG DALAM	TAKISUNG
79	30300573	UPTD SD NEGERI 1 TABANIO	TAKISUNG
80	30300590	UPTD SD NEGERI 2 TABANIO	TAKISUNG
81	30300631	UPTD SD NEGERI 3 TABANIO	TAKISUNG
82	30300689	UPTD SD NEGERI 1 TAKISUNG	TAKISUNG
83	30300688	UPTD SD NEGERI 2 TAKISUNG	TAKISUNG
84	30300694	UPTD SD NEGERI TELAGA LANGSAT	TAKISUNG
85	30300740	UPTD SD NEGERI 1 BATAKAN	PANYIPATAN
86	30300739	UPTD SD NEGERI 2 BATAKAN	PANYIPATAN
87	30300738	UPTD SD NEGERI 3 BATAKAN	PANYIPATAN
88	30300794	UPTD SD NEGERI 1 BATU MULIA	PANYIPATAN
89	30300835	UPTD SD NEGERI 2 BATU MULIA	PANYIPATAN
90	30300852	UPTD SD NEGERI 1 BATU TUNGKU	PANYIPATAN
91	30300851	UPTD SD NEGERI 2 BATU TUNGKU	PANYIPATAN

NO	NPSN	NAMA UNIT	KECAMATAN
92	30300850	UPTD SD NEGERI 3 BATU TUNGKU	PANYIPATAN
93	30300855	UPTD SD NEGERI 1 BUMI ASIH	PANYIPATAN
94	30300866	UPTD SD NEGERI 2 BUMI ASIH	PANYIPATAN
95	30300832	UPTD SD NEGERI KANDANGAN BARU	PANYIPATAN
96	30300831	UPTD SD NEGERI KANDANGAN LAMA	PANYIPATAN
97	30300608	UPTD SD NEGERI KURINGKIT	PANYIPATAN
98	30300622	UPTD SD NEGERI 1 PANYIPATAN	PANYIPATAN
99	30300621	UPTD SD NEGERI 2 PANYIPATAN	PANYIPATAN
100	30300620	UPTD SD NEGERI 3 PANYIPATAN	PANYIPATAN
101	30300589	UPTD SD NEGERI SUKARAMAH	PANYIPATAN
102	30300677	UPTD SD NEGERI TANJUNG DEWA	PANYIPATAN
103	30300724	UPTD SD NEGERI JILATAN ALUR	BATU AMPAR
104	30300723	UPTD SD NEGERI 1 AMBAWANG	BATU AMPAR
105	30300722	UPTD SD NEGERI 2 AMBAWANG	BATU AMPAR
106	30300713	UPTD SD NEGERI BATU AMPAR	BATU AMPAR
107	30300836	UPTD SD NEGERI BLURU	BATU AMPAR
108	30300870	UPTD SD NEGERI DAMAR LIMA	BATU AMPAR
109	30300871	UPTD SD NEGERI 1 DAMIT	BATU AMPAR
110	30300872	UPTD SD NEGERI 2 DAMIT	BATU AMPAR
111	30300873	UPTD SD NEGERI 3 DAMIT	BATU AMPAR
112	30300865	UPTD SD NEGERI DAMIT HULU	BATU AMPAR
113	30300864	UPTD SD NEGERI 1 DURIAN BUNGKUK	BATU AMPAR
114	30300856	UPTD SD NEGERI 2 DURIAN BUNGKUK	BATU AMPAR
115	30300834	UPTD SD NEGERI GUNUNG MAS	BATU AMPAR
116	30300833	UPTD SD NEGERI 1 GUNUNG MELATI	BATU AMPAR
117	30300812	UPTD SD NEGERI 2 GUNUNG MELATI	BATU AMPAR
118	30300801	UPTD SD NEGERI JILATAN	BATU AMPAR
119	30300623	UPTD SD NEGERI PANTAI LINUH	BATU AMPAR
120	30300712	UPTD SD NEGERI TAJAU MULIA	BATU AMPAR
121	30300691	UPTD SD NEGERI 1 TAJAU PECAH	BATU AMPAR
122	30300690	UPTD SD NEGERI 2 TAJAU PECAH	BATU AMPAR
123	30300727	UPTD SD NEGERI 1 ALUR	JORONG

NO	NPSN	NAMA UNIT	KECAMATAN
124	30300726	UPTD SD NEGERI 2 ALUR	JORONG
125	30300714	UPTD SD NEGERI 1 ASAM - ASAM	JORONG
126	30300731	UPTD SD NEGERI 2 ASAM - ASAM	JORONG
127	30300732	UPTD SD NEGERI 3 ASAM - ASAM	JORONG
128	30300733	UPTD SD NEGERI 4 ASAM - ASAM	JORONG
129	30300750	UPTD SD NEGERI 5 ASAM - ASAM	JORONG
130	30300749	UPTD SD NEGERI 6 ASAM - ASAM	JORONG
131	30300748	UPTD SD NEGERI 7 ASAM - ASAM	JORONG
132	30300747	UPTD SD NEGERI 8 ASAM - ASAM	JORONG
133	30300737	UPTD SD NEGERI BATALANG	JORONG
134	30300800	UPTD SD NEGERI 1 JORONG	JORONG
135	30300799	UPTD SD NEGERI 2 JORONG	JORONG
136	30300798	UPTD SD NEGERI 3 JORONG	JORONG
137	30300797	UPTD SD NEGERI 4 JORONG	JORONG
138	30300602	UPTD SD NEGERI MUARA ASAM - ASAM	JORONG
139	30300553	UPTD SD NEGERI 1 SABUHUR	JORONG
140	30300554	UPTD SD NEGERI 2 SABUHUR	JORONG
141	30300556	UPTD SD NEGERI 3 SABUHUR	JORONG
142	30300725	UPTD SD NEGERI 4 SABUHUR	JORONG
143	30300574	UPTD SD NEGERI SWARANGAN	JORONG
144	30300853	UPTD SD NEGERI 1 BUKIT MULIA	KINTAP
145	30300854	UPTD SD NEGERI 2 BUKIT MULIA	KINTAP
146	30305452	UPTD SD NEGERI 3 BUKIT MULIA	KINTAP
147	30300825	UPTD SD NEGERI 1 KEBUN RAYA	KINTAP
148	30300824	UPTD SD NEGERI 2 KEBUN RAYA	KINTAP
149	30300822	UPTD SD NEGERI 1 KINTAP	KINTAP
150	69989741	UPTD SD NEGERI 2 KINTAP	KINTAP
151	30300821	UPTD SD NEGERI 1 KINTAP KECIL	KINTAP
152	30300820	UPTD SD NEGERI 2 KINTAP KECIL	KINTAP
153	30300819	UPTD SD NEGERI 1 KINTAPURA	KINTAP
154	69989740	UPTD SD NEGERI 2 KINTAPURA	KINTAP
155	30300603	UPTD SD NEGERI MEKARSARI	KINTAP

NO	NPSN	NAMA UNIT	KECAMATAN
156	30300600	UPTD SD NEGERI 1 MUARA KINTAP	KINTAP
157	30300601	UPTD SD NEGERI 2 MUARA KINTAP	KINTAP
158	69989975	UPTD SD NEGERI 3 MUARA KINTAP	KINTAP
159	30300611	UPTD SD NEGERI 1 PANDAN SARI	KINTAP
160	30300612	UPTD SD NEGERI 2 PANDAN SARI	KINTAP
161	30300629	UPTD SD NEGERI 3 PANDAN SARI	KINTAP
162	30300619	UPTD SD NEGERI PASIR PUTIH	KINTAP
163	30300550	UPTD SD NEGERI 1 RIAM ADUNGAN	KINTAP
164	30300551	UPTD SD NEGERI 2 RIAM ADUNGAN	KINTAP
165	30300557	UPTD SD NEGERI 1 SALAMAN	KINTAP
166	69896449	UPTD SD NEGERI 2 SALAMAN	KINTAP
167	30300572	UPTD SD NEGERI SEBAMBAN BARU	KINTAP
168	30300588	UPTD SD NEGERI 1 SUMBER JAYA	KINTAP
169	30300587	UPTD SD NEGERI 2 SUMBER JAYA	KINTAP
170	30300583	UPTD SD NEGERI 1 SUNGAI CUKA	KINTAP
171	69989135	UPTD SD NEGERI 2 SUNGAI CUKA	KINTAP
172	30300743	UPTD SD NEGERI 1 BANYU IRANG	BATI-BATI
173	30300742	UPTD SD NEGERI 2 BANYU IRANG	BATI-BATI
174	30300741	UPTD SD NEGERI 3 BANYU IRANG	BATI-BATI
175	30300736	UPTD SD NEGERI 1 BATI - BATI	BATI-BATI
176	30300735	UPTD SD NEGERI 2 BATI - BATI	BATI-BATI
177	30300848	UPTD SD NEGERI 1 BENTOK DARAT	BATI-BATI
178	30300847	UPTD SD NEGERI 2 BENTOK DARAT	BATI-BATI
179	69967839	UPTD SD NEGERI 3 BENTOK DARAT	BATI-BATI
180	30300846	UPTD SD NEGERI BENTOK KAMPUNG	BATI-BATI
181	30300843	UPTD SD NEGERI 1 BENUA RAYA	BATI-BATI
182	30300842	UPTD SD NEGERI 2 BENUA RAYA	BATI-BATI
183	30300796	UPTD SD NEGERI 1 KAIT-KAIT	BATI-BATI
184	30300813	UPTD SD NEGERI 2 KAIT-KAIT	BATI-BATI
185	30300607	UPTD SD NEGERI 1 LIANG ANGGANG	BATI-BATI
186	30312652	UPTD SD NEGERI 2 LIANG ANGGANG	BATI-BATI
187	30300599	UPTD SD NEGERI 1 NUSA INDAH	BATI-BATI

NO	NPSN	NAMA UNIT	KECAMATAN
188	30305449	UPTD SD NEGERI 2 NUSA INDAH	BATI-BATI
189	30300597	UPTD SD NEGERI PADANG	BATI-BATI
190	30300593	UPTD SD NEGERI 1 PANDAHAN	BATI-BATI
191	30300610	UPTD SD NEGERI 2 PANDAHAN	BATI-BATI
192	30300558	UPTD SD NEGERI SAMBANGAN	BATI-BATI
193	30300708	UPTD SD NEGERI 1 UJUNG	BATI-BATI
194	30300707	UPTD SD NEGERI 2 UJUNG	BATI-BATI
195	30300706	UPTD SD NEGERI UJUNG BARU	BATI-BATI
196	30300838	UPTD SD NEGERI 1 BINGKULU	TAMBANG ULANG
197	30300837	UPTD SD NEGERI 2 BINGKULU	TAMBANG ULANG
198	30300811	UPTD SD NEGERI GUNUNG RAJA	TAMBANG ULANG
199	30300827	UPTD SD NEGERI KAYU ABANG	TAMBANG ULANG
200	30300826	TUTUP	TAMBANG ULANG
200	30300605	UPTD SD NEGERI 1 MARTADAH	TAMBANG ULANG
201	30300604	UPTD SD NEGERI 2 MARTADAH	TAMBANG ULANG
202	30300564	UPTD SD NEGERI 1 PULAU SARI	TAMBANG ULANG
203	30300565	UPTD SD NEGERI 2 PULAU SARI	TAMBANG ULANG
204	30300582	UPTD SD NEGERI 1 SUNGAI JELAI	TAMBANG ULANG
205	30300581	UPTD SD NEGERI 2 SUNGAI JELAI	TAMBANG ULANG
206	30300580	UPTD SD NEGERI SUNGAI PINANG	TAMBANG ULANG
207	30300684	UPTD SD NEGERI 1 TAMBANG ULANG	TAMBANG ULANG
208	30300683	UPTD SD NEGERI 2 TAMBANG ULANG	TAMBANG ULANG
209	30300849	UPTD SD NEGERI BAWAH LAYUNG	KURAU
210	30300805	UPTD SD NEGERI 1 HANDIL NEGARA	KURAU
211	30300804	UPTD SD NEGERI 2 HANDIL NEGARA	KURAU
212	30300814	UPTD SD NEGERI KALI BESAR	KURAU
213	30300795	UPTD SD NEGERI KURAU	KURAU
214	30300606	UPTD SD NEGERI MALUKA BAULIN	KURAU
215	30300596	UPTD SD NEGERI 1 PADANG LUAS	KURAU
216	30300595	UPTD SD NEGERI 2 PADANG LUAS	KURAU
217	30300566	UPTD SD NEGERI RADEN	KURAU
218	30300571	UPTD SD NEGERI SARIKANDI	KURAU

NO	NPSN	NAMA UNIT	KECAMATAN
219	30300584	UPTD SD NEGERI SUNGAI BAKAU	KURAU
220	30300687	UPTD SD NEGERI TAMBAK KARYA	KURAU
221	30300686	UPTD SD NEGERI 1 TAMBAK SARINAH	KURAU
222	30300685	UPTD SD NEGERI 2 TAMBAK SARINAH	KURAU
223	30300867	UPTD SD NEGERI BUMI HARAPAN	BUMI MAKMUR
224	30300810	UPTD SD NEGERI HANDIL BABIRIK	BUMI MAKMUR
225	30300809	UPTD SD NEGERI BIRAYANG ATAS	BUMI MAKMUR
226	30300808	UPTD SD NEGERI BIRAYANG BAWAH	BUMI MAKMUR
227	30300807	UPTD SD NEGERI HANDIL GAYAM	BUMI MAKMUR
228	30300806	UPTD SD NEGERI HANDIL MALUKA	BUMI MAKMUR
229	30300803	UPTD SD NEGERI HANDIL 1 SURUK	BUMI MAKMUR
230	30300802	UPTD SD NEGERI HANDIL 2 SURUK	BUMI MAKMUR
231	30300630	UPTD SD NEGERI 1 KURAU UTARA	BUMI MAKMUR
232	30300609	UPTD SD NEGERI 2 KURAU UTARA	BUMI MAKMUR
233	30300624	UPTD SD NEGERI PANTAI HARAPAN	BUMI MAKMUR
234	30300579	UPTD SD NEGERI 1 SUNGAI RASAU	BUMI MAKMUR
235	30300578	UPTD SD NEGERI 2 SUNGAI RASAU	BUMI MAKMUR

PJ. BUPATI TANAH LAUT,

ttd

SYAMSIR RAHMAN

SALENAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 198903 2 008

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 52 TAHUN 2024
TANGGAL : 21 OKTOBER 2024

**DAFTAR UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	NPSN	NAMA UNIT	KECAMATAN
1	30300638	UPTD SMP NEGERI 1 PELAIHARI	PELAIHARI
2	30304919	UPTD SMP NEGERI 2 PELAIHARI	PELAIHARI
3	30300664	UPTD SMP NEGERI 3 PELAIHARI	PELAIHARI
4	30300659	UPTD SMP NEGERI 4 PELAIHARI	PELAIHARI
5	30300658	UPTD SMP NEGERI 5 PELAIHARI	PELAIHARI
6	30300656	UPTD SMP NEGERI 6 PELAIHARI	PELAIHARI
7	30311436	UPTD SMP NEGERI 7 PELAIHARI	PELAIHARI
8	69946142	UPTD SMP NEGERI 8 PELAIHARI	PELAIHARI
9	30304932	UPTD SMP NEGERI 1 BAJUIN	BAJUIN
10	30304936	UPTD SMP NEGERI 2 BAJUIN	BAJUIN
11	30311732	UPTD SMP NEGERI 3 BAJUIN	BAJUIN
12	60702925	UPTD SMP NEGERI 4 BAJUIN	BAJUIN
13	30300637	UPTD SMP NEGERI 1 TAKISUNG	TAKISUNG
14	30300669	UPTD SMP NEGERI 2 TAKISUNG	TAKISUNG
15	30300663	UPTD SMP NEGERI 3 TAKISUNG	TAKISUNG
16	30304933	UPTD SMP NEGERI 4 TAKISUNG	TAKISUNG
17	30311438	UPTD SMP NEGERI 5 TAKISUNG	TAKISUNG
18	30300639	UPTD SMP NEGERI 1 PANYIPATAN	PANYIPATAN
19	30304918	UPTD SMP NEGERI 2 PANYIPATAN	PANYIPATAN
20	30304926	UPTD SMP NEGERI 3 PANYIPATAN	PANYIPATAN

NO	NPSN	NAMA UNIT	KECAMATAN
21	30304905	UPTD SMP NEGERI 1 BATU AMPAR	BATU AMPAR
22	30300634	UPTD SMP NEGERI 2 BATU AMPAR	BATU AMPAR
23	30300667	UPTD SMP NEGERI 3 BATU AMPAR	BATU AMPAR
24	30304930	UPTD SMP NEGERI 4 BATU AMPAR	BATU AMPAR
25	30314183	UPTD SMP NEGERI 5 BATU AMPAR	BATU AMPAR
26	30300643	UPTD SMP NEGERI 1 JORONG	JORONG
27	30300633	UPTD SMP NEGERI 2 JORONG	JORONG
28	30304923	UPTD SMP NEGERI 3 JORONG	JORONG
29	30304931	UPTD SMP NEGERI 4 JORONG	JORONG
30	30311439	UPTD SMP NEGERI 5 JORONG	JORONG
31	30311734	UPTD SMP NEGERI 6 JORONG	JORONG
32	30300641	UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP	KINTAP
33	30300650	UPTD SMP NEGERI 2 KINTAP	KINTAP
34	30304924	UPTD SMP NEGERI 3 KINTAP	KINTAP
35	30311440	UPTD SMP NEGERI 4 KINTAP	KINTAP
36	30311735	UPTD SMP NEGERI 5 KINTAP	KINTAP
37	30304904	UPTD SMP NEGERI 1 BATI - BATI	BATI-BATI
38	30300635	UPTD SMP NEGERI 2 BATI - BATI	BATI-BATI
39	30304921	UPTD SMP NEGERI 3 BATI - BATI	BATI-BATI
40	30300662	UPTD SMP NEGERI 4 BATI - BATI	BATI-BATI
41	60702926	UPTD SMP NEGERI 5 BATI - BATI	BATI-BATI
42	69965913	UPTD SMP NEGERI 6 BATI - BATI	BATI-BATI
43	30300636	UPTD SMP NEGERI 1 TAMBANG ULANG	TAMBANG ULANG
44	30311437	UPTD SMP NEGERI 2 TAMBANG ULANG	TAMBANG ULANG

NO	NPSN	NAMA UNIT	KECAMATAN
45	30300640	UPTD SMP NEGERI 1 KURAU	KURAU
46	30311733	UPTD SMP NEGERI 2 KURAU	KURAU
47	30300651	UPTD SMP NEGERI 1 BUMI MAKMUR	BUMI MAKMUR
48	30304925	UPTD SMP NEGERI 2 BUMI MAKMUR	BUMI MAKMUR
49	69989228	UPTD SMP NEGERI 6 KINTAP	KINTAP

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

PJ. BUPATI TANAH LAUT,

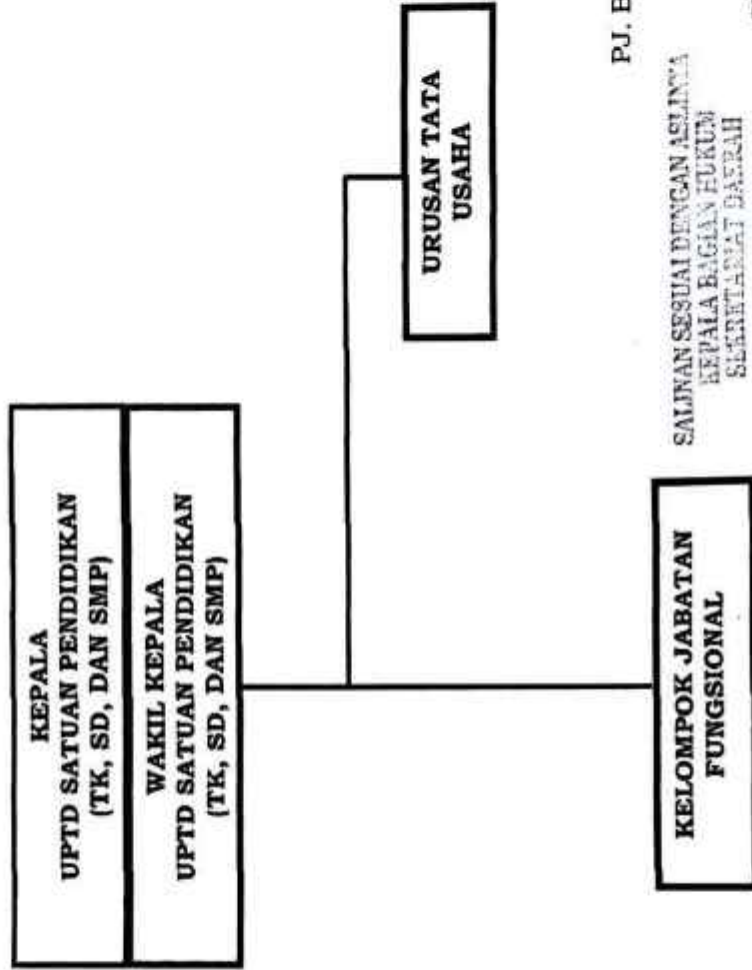
ttd

SYAMSIR RAHMAN

ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 52 TAHUN 2024
TANGGAL : 21 OKTOBER 2024

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL SH. MH
NIP.19750203 199603 2 808